

# SENGKETA CHINA DAN ASEAN DI LAUT CHINA SELATAN

**Ruth Ivanna Sihite**  
**Program Studi Ketahanan Energi untuk Keamanan Nasional**  
**Universitas Pertahanan Indonesia**  
**Komp. Indonesia Peace and Security Center, Sentul, Bogor**  
**ruth\_ivana@yahoo.com**

## Abstrak

Setelah China meningkatkan kapasitas persenjataannya, ketegangan di Laut China Selatan kembali mencuat pada tahun 2008. Peningkatan *power* China memicu sikap yang asertif bahkan unilateralis. Peningkatan sengketa di kawasan tersebut ditandai dengan peningkatan kapabilitas persenjataan, seperti pembelian kapal induk yang bertujuan untuk menjaga keamanan Laut China Selatan. Untuk itu, studi dalam tulisan ini mengambil periode waktu 2008-2011. Meski demikian, penelitian ini juga menggunakan data-data hingga 2012 sebagai data pendukung, terlebih karena ketegangan di Laut China Selatan terus meningkat selama awal hingga pertengahan 2012.

Kata kunci: sengketa wilayah, China, ASEAN, Laut China Selatan

## Abstract

*After China improved its weapons capacity, tensions in the South China Sea was raised again in 2008. China's increasing power triggered assertive, even unilateralist attitude. The increasing of disputes in the region marked by raising the capability of weapons, such as the purchase of an aircraft carrier that aims to maintain the security of the South China Sea. Therefore, the study took period in 2008-2011. However, this research also used the data to 2012 as supporting data, especially because the tensions in the South China Sea continue to increase during the early to mid-2012.*

*Keywords: territorial disputes, China, ASEAN, South China Sea*

## Pendahuluan

Laut sangat penting bagi kehidupan manusia. Laut berfungsi sebagai jalur transportasi, jalur informasi, dan jalur perdagangan. Fungsi laut yang sedemikian besar menjadikan laut sebagai elemen yang memiliki fungsi sama besar dalam membangun kerja sama internasional maupun menjadi sumber sengketa internasional.

Tiga perempat penduduk dunia tinggal di daerah pesisir. Demikian pula 80% kota besar dan hampir semua pusat perdagangan internasional maupun pusat kekuatan militer berada di pesisir (Till, 2009: 226-231).

Laut merupakan sumber dari sumber daya alam yang berguna bagi manusia, seperti minyak, gas, ikan, mineral, dan lain-lain. Minyak adalah

salah satu sumber daya strategis dalam kemajuan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat umumnya didorong oleh peningkatan industri, sektor yang paling banyak menggunakan energi dari segala bentuk sumber daya, baik minyak bumi, gas alam, maupun batu bara yang digunakan sebagai penghasil tenaga listrik untuk menggerakkan peralatan-peralatan industri. Peningkatan kebutuhan China terhadap minyak dan sumber energi lainnya mendorong negara tersebut untuk menguasai jalur sutra, Laut China Selatan (LCS).

Tema mengenai LCS sudah banyak diteliti. Namun, tulisan ini berfokus pada faktor pemicu sikap negara dalam sengketa di LCS, khususnya klaim atas Pulau Paracel dan Spratly yang terjadi sejak abad ke-19. Klaim ini kembali mencuat dan semakin kuat pada akhir 2008 ketika China menyatakan kedaulatan atas seluruh wilayah LCS, baik perairan maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Klaim tersebut tentu akan menutup kesempatan negara-negara lain yang juga bersengketa untuk mendapatkan bagian atas kawasan strategis itu. Klaim China mempersulit penyelesaian ketegangan di kawasan itu, terlebih karena China tidak bersedia terlibat dalam negosiasi regional.

Konflik teritori LCS sangat kompleks akibat banyaknya pihak yang mengajukan klaim, termasuk pihak luar yang terlibat dalam persengketaan, seperti Amerika Serikat (AS) yang secara langsung maupun tidak langsung berada dalam lingkaran konflik LCS. AS berdalih bahwa keterlibatannya bertujuan untuk menjalankan salah satu perannya sebagai negara *superpower* yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dunia.

Ketika China menunjukkan sikap asertifnya di kawasan sengketa tersebut, AS adalah negara yang bereaksi paling cepat. Pada tahun 1999, AS segera menempatkan dua kapal induknya di kawasan LCS saat China menunjukkan klaim yang kuat. Saat itu, ketegangan antara Beijing dan Taiwan sedang memanas sehingga berujung pada peningkatan kapabilitas persenjataan kedua negara. Klaim China mendapat tanggapan negatif. Isu yang banyak beredar terhadap klaim dan sikap China adalah keinginan negara tersebut untuk menguasai keseluruhan LCS (Smith, 1994: 274-294).

China dinilai sebagai pihak yang tamak dan ingin memperebutkan wilayah teritorial LCS untuk mendapatkan akses penuh terhadap energi, yaitu minyak dan gas yang ada di kawasan itu (Dobson dan Fravel, 1997: 258). Dalam kebijakan

luar negerinya, China secara terbuka menyebutkan bahwa energi dan bahan mentah adalah sumber yang sangat penting untuk dapat menjalankan perekonomian (Zweig dan Bi, 2005: 25-38). Pendapat lain mengatakan bahwa keinginan untuk mengambil kembali wilayah teritorial adalah bagian dari komitmen elite-elite China. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa dengan menguasai wilayah LCS berarti akan memperkuat posisi tawar yang dapat digunakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya dalam proses-proses negosiasi (Hyer, 2006: 34-54). Klaim China juga dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan akses penangkapan ikan, seperti misalnya di wilayah Hainan (Zha, 2001: 575-598).

Konflik LCS telah melibatkan sejumlah proses diplomasi internasional. Upaya negosiasi dan alternatif kerja sama juga telah diajukan sebagai proses penyelesaian. Hingga pertengahan tahun 2016, belum ada tanda-tanda bahwa konflik di wilayah tersebut akan berakhir, bahkan kondisinya semakin memanas. Pada bulan Juni 2011, Vietnam menuduh China memutus jalur eksplorasi minyak dan gas mereka. Menurut Vietnam, peristiwa itu adalah kali kedua China melakukan hal yang sama (Wines, 2011). Akibat perseteruan tersebut, aksi masing-masing pihak

mengundang tanggapan pihak lain. Vietnam membeli kapal selam Rusia, ditanggapi dengan meningkatkan aktivitas latihan militernya. China juga menyatakan bahwa jumlah pasukannya yang akan ditempatkan di kawasan LCS akan terus meningkat hingga 2020.

Tidak hanya dengan Vietnam, ketegangan antara China dan Filipina juga meningkat. Sejak 1992, kerja sama militer antara Filipina dan AS terjalin semakin baik, terutama untuk tujuan kontraterorisme dan keamanan maritim. Dalam agenda kebijakan keamanannya, AS juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan kebijakan negaranya adalah meningkatkan aliansi dengan Filipina. Alasan utamanya yaitu untuk stabilitas LCS (Lum, 2012). Ketegangan di LCS semakin meningkat menyusul peningkatan kerja sama AS dan Filipina tersebut, terutama latihan militer yang intensif antara kedua negara. Kerja sama tersebut sebagai upaya menyediakan pengamanan eksplorasi minyak di LCS. Hal ini memancing kekhawatiran dan reaksi China yang akhirnya menyebabkan ketegangan di LCS semakin buruk (Alexander dan Mogato, 2012).

### **China, *Power*, dan Unilateralisme**

Konsep *power* merupakan terminologi yang paling banyak menimbulkan masalah dalam sistem

internasional dan dalam ilmu politik secara umum. *Power*, dalam buku *War and Change in World Politics*, mengarah pada kekuatan militer, ekonomi, dan kapabilitas teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Definisi ini kemudian mengabaikan elemen-elemen *intangible* lainnya, seperti moral publik, aksi-aksi politik, kualitas kepemimpinan, dan faktor-faktor institusional. Perubahan dalam sistem politik, ekonomi, dan teknologi menjanjikan keuntungan bagi pihak tertentu dan ancaman kerugian bagi pihak lainnya (Gilpin, 2009: 9-20). Dalam banyak kasus, keuntungan dan kerugian ini sifatnya hanya sedikit dan hanya memerlukan sedikit penyesuaian. Perubahan tersebut memerlukan waktu untuk penyesuaian kembali, dan biasanya tidak menyebabkan fase ketidakstabilan bila aktor-aktornya memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Namun, perubahan dalam sistem internasional selalu menimbulkan fase ketidakstabilan.

Aspek psikologis *power*, yang lebih sering tidak dapat dihitung, lebih dekat jika diasosiasikan dengan konsep martabat. Hubungan antara *power* dan martabat memiliki signifikansi yang kuat dalam sistem internasional. *Power* perlu ditunjukkan untuk mendapatkan legalitas yang lebih kuat atas kepemilikan *power* tersebut. Kekuatan baru dan perubahan

sistem internasional yang menjelaskan bahwa selalu ada kekuatan dominan dalam sistem politik internasional dan negara yang akan mengisi posisi tersebut adalah negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menjadi pemilik *power* yang paling dominan dan yang bersikap unilateral untuk memperkuat *power*-nya.

Berdasarkan teori Robert Gilpin, dalam sistem internasional akan terjadi perubahan distribusi kekuasaan (*distribution of power*). China ingin mendapatkan porsi distribusi kekuasaan setelah penurunan kekuasaan AS. Hal ini dapat dilakukan oleh China seiring dengan peningkatan kapabilitas militer dan ekonomi yang mengalami peningkatan luar biasa. Jika berhasil menjadi pemilik kedaulatan di LCS, legalitas China sebagai pemilik *power* yang terbesar di Asia semakin kuat. Negara yang memiliki *power* cenderung bersikap lebih unilateralis. Negara yang paling unilateralis di dunia adalah AS. Salah satu bentuk sikap unilateralis negara tersebut terlihat dari George W. Bush dengan semboyan “*go it alone*” yang menjadi dasar keputusan unilateral negara baik untuk domestik maupun hubungan luar negeri (Kelly, 2003).

Sikap unilateral suatu negara mendorong negara tersebut untuk bertindak sepihak tanpa memper-

timbangkan pandangan pihak lain. Keyakinan yang besar atas kebenaran keputusan yang diambilnya menjadi dasar tindakan-tindakan sepihak yang merupakan cara untuk melindungi negaranya.

Keputusan unilateral lahir dari keyakinan akan kebenaran yang dimiliki negaranya. Keputusan tersebut kerap terjadi akibat pandangan yang tertutup atas kebenaran lain, kesalahan informasi, serta tidak adanya informasi moral yang menyertai informasi lain sehingga menimbulkan penilaian dan justifikasi. Karena itu, keputusan unilateralis oleh pembuatnya dianggap sebagai sebuah kebenaran tanpa dapat mengukur kebenaran tersebut. Sikap ini kemudian membangun kepercayaan diri yang lebih besar untuk melakukan suatu aksi.

Sikap unilateral suatu negara tumbuh dari pandangan monokromatik yang sangat lugas dan tegas melihat perbedaan dan mendefinisikan sikap. Unilateralisme mendorong suatu negara untuk tidak takut menjadi yang paling berbeda, bahkan dengan aliansinya. Tindakan unilateral dalam *Second Report on Unilateral Acts of States* yang dibuat oleh *International Law Commission* (ILC) didefinisikan sebagai “*An unequivocal, autonomous expression of will, formulated publicly by one or more States in relation to one*

*or more other States, the international community as a whole or an international organization, with the intention of acquiring international legal obligations*”.

### **Kepentingan China di LCS**

Perubahan drastis terjadi dalam masa 20 tahun. China yang semula adalah negara pengekspor minyak terbesar kedua di Asia Timur berubah menjadi negara pengimpor minyak kedua terbesar sejak 1997 (Zweig dan Bi, 2005: 25-38). Pada tahun 2007, China menempati urutan kedua sebagai negara pengguna minyak terbanyak di dunia.

Untuk memenuhi kebutuhan energi domestik yang bertambah dengan cepat, China melakukan tiga langkah (Lai, 2007: 519-537). *Pertama*, melakukan ekspansi ke negara-negara Timur Tengah sebagai pemasok minyak. *Kedua*, memperluas sumber impor hingga negara-negara Afrika, Rusia, Asia Tengah, dan Amerika Selatan. *Ketiga*, mengamankan jalur transportasi minyak ke negaranya.

China memperkirakan LCS adalah sumber cadangan energi yang bisa diandalkan sehingga menguasai kawasan tersebut sangat penting baginya (Buszynski dan Sazlan, 2007: 25-38). Prediksi tentang cadangan energi di LCS

adalah salah satu motivasi China bersikap sangat unilateral. China optimis bahwa Laut China Selatan memiliki kandungan energi yang sangat besar. *Energy Information Administration* (EIA) milik AS memperkirakan jumlah cadangan minyak di LCS adalah sekitar 7 milyar barrel atau sekitar 960 juta ton. Untuk jumlah energi tersebut, China tidak bersedia membagi risiko melalui kerja sama dengan negara lain. Mereka lebih memilih untuk menerapkan strategi peningkatan kekuatan laut (Till, 2009: 145-148).

### Sejarah Sengketa LCS

Sengketa LCS tidak lepas dari klaim kepemilikan atas Kepulauan Spratly. Klaim ini sudah terjadi sejak awal 1800-an saat kompetisi kolonialisme terjadi di kawasan Indochina. Sejak keruntuhan kerajaan Inggris dan Perancis, terjadi kekosongan kekuasaan hingga abad ke-20 (Furtado, 1999: 386-404). Kondisi ini menyebabkan ketiadaan hukum, aturan, norma, peraturan, dan mekanisme yang mengatur penyelesaian konflik wilayah. Akibatnya, terjadi persaingan antara Inggris, Perancis, Jepang, dan China tentang pemilik kedaulatan di LCS. Hal ini memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengambil alih kekuasaan di kawasan tersebut. Bahkan, beberapa

negara ASEAN ikut terlibat dengan masalah sengketa Spratly.

Terdapat empat kelompok kepulauan yang menjadi sengketa di LCS (Rousseau, 2012). *Pertama*, Kepulauan Prata atau Dongsha, yang diklaim oleh Taiwan dan China. *Kedua*, Macclesfield Bank (di China dikenal dengan Zongsha) yang diklaim oleh China, Taiwan, dan Filipina. *Ketiga*, Kepulauan Paracel (di China dikenal sebagai Xishi) yang berada di bawah pemerintahan China sebagai bagian dari Propinsi Hainan. Akan tetapi, kepulauan ini diklaim juga oleh Vietnam. Sebelum tahun 1974, Vietnam menguasai beberapa pulau di wilayah tersebut, tetapi kemudian diduduki oleh China setelah berkonflik dengan Vietnam dan Taiwan. *Keempat*, Kepulauan Spratly yang dalam Bahasa China dikenal Nansha. Kepulauan yang terletak paling selatan di LCS ini sulit untuk dibedakan antara kepulauan, pulau-pulau kecil, bebatuan, dan perbatasan pulau-pulaunya sehingga sulit untuk mengidentifikasi jumlah persis pulau di kepulauan ini.

Jumlah keseluruhan pulau di LCS mencapai 90.650 pulau dan 50 di antaranya tidak berpenghuni. Keseluruhan wilayah ini diklaim oleh tiga negara, yaitu China, Taiwan, dan Vietnam. Sedangkan tiga negara lagi (Filipina, Malaysia, dan Brunei) mengklaim

sebagian dari kepulauan tersebut. Kepulauan Spratly dan Paracel adalah dua pulau yang menjadi fokus persengketaan. Pulau lain yang diperebutkan adalah Macclesfield Bank yang diperebutkan oleh China, Taiwan, dan Filipina. Scarborough Shoal atau Pulau Huangyan diperebutkan oleh China dan Taiwan. Pulau Spratly terletak di selatan China, di tenggara Vietnam, di barat Filipina, dan di utara Malaysia. Sejak diperebutkan pada tahun 1988, telah terjadi beberapa insiden di wilayah tersebut, termasuk baku tembak antara China, Vietnam, dan Filipina.

Selain Brunei, semua negara yang menyatakan klaim kedaulatan pernah menunjukkan kekuatan militernya. Vietnam menghadirkan kekuatan militernya di 27 pulau dan menduduki sembilan pulau. Malaysia menguasai tiga pulau dan mencoba menunjukkan kekuatan militer di dua pulau lainnya. Sedangkan Taiwan menguasai pulau terbesar, Itu Aba.

Setidaknya, ada tiga hal yang dipermasalahkan pihak-pihak yang bersengketa di LCS, yaitu klaim kepemilikan wilayah teritorial, peraturan yang diterapkan, dan isu politik di kawasan (Dutton, 2012). Sengketa perbatasan pantai maupun kedalaman laut tidak terlepas dari penerapan hak-hak hukum yang mengatur penggunaan

dan kepemilikan segala sumber daya yang ada di bawah laut maupun di kawasan lepas pantai. Konflik teritorial yang paling banyak terjadi dipicu oleh penetapan batas-batas perbatasan antara satu negara dengan negara lainnya. Batas pantai menentukan hak dan kewajiban suatu negara. Penggunaan laut baik untuk tujuan ekonomi maupun militer ditentukan oleh kepemilikan hingga wilayah perbatasan. Persaingan untuk mendapatkan perbatasan adalah hal yang mutlak. Hak perbatasan akan menjadi milik satu negara. Karena itu, persaingan untuk mendapatkan batas yang lebih jauh di kawasan perbatasan menjadi sangat penting bagi negara-negara yang bertetangga.

Sengketa Kepulauan Spratly kembali mencuat sejak 40 tahun lalu dengan enam aktor yang masing-masing mengajukan klaim kedaulatan atas wilayah itu, yaitu China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Sengketa laut dan wilayah teritorial di LCS sulit diselesaikan karena konflik di kawasan ini merupakan masalah yang kompleks yang menyangkut fakta sejarah dan hukum yang diberlakukan. Masing-masing negara yang mengajukan klaim atas wilayah di LCS memiliki alasan yang berbeda. China dan Taiwan mengajukan klaim atas catatan sejarah. Malaysia, Vietnam, dan Filipina

mengajukan klaim atas konvensi hukum laut yang menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan hak mereka.

Perubahan signifikan terjadi pada 1995 saat terjadinya insiden Mischief Reef. Saat itu, Angkatan Laut *People's Liberation Army* (PLA) China membangun pangkalan di kawasan tersebut sehingga menimbulkan konfrontasi antara China dan Filipina. Pulau Spratly terletak di sebelah timur Vietnam dan di selatan Pulau Hainan yang merupakan salah satu propinsi China. Dibandingkan dengan Spratly, klaim terhadap Kepulauan Paracel terbilang menimbulkan lebih sedikit konflik. Meski demikian, Vietnam tetap tidak menerima pemerintahan China di wilayah tersebut hingga kini. Setelah kekalahan Vietnam tahun 1974 dalam pertempuran laut dengan China, Kepulauan Spratly berada di bawah kepemimpinan China.

Dari enam negara yang mengajukan klaim atas Kepulauan Spratly, klaim yang sangat kuat diajukan oleh lima negara, yaitu China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Namun, klaim terkuat datang dari China yang menyatakan bahwa keseluruhan Kepulauan Spratly berada di bawah kedaulatannya. Klaim yang kuat dari lima aktor ini menjadi indikasi bahwa tidak akan ada penyelesaian yang

menghasilkan *win-win solution* bagi setiap pihak. Kemenangan bagi satu pihak adalah kerugian bagi pihak lain.

### **Berbagai Klaim di LCS**

China menyatakan LCS sudah berada di bawah pemerintahannya sejak kekuasaan Dinasti Xia yang memerintah antara abad ke-21 SM hingga abad ke-16 SM. China menyatakan diri sebagai negara yang pertama kali menempatkan LCS dan kepulauan di sekitarnya dalam hukum nasional yang kemudian menerima penyerahan dari Jepang pada akhir Perang Dunia II. China kemudian mengambil alih kedaulatan atas wilayah tersebut. Menurut China, pemberian nama atas wilayah tersebut dan pembuatan petanya dilakukan oleh China. Tidak hanya itu, China juga mengaku sebagai pihak yang mempelajari, melakukan aktivitas, dan juga menjaga wilayah tersebut.

China mengklaim telah membuka jalur laut di LCS untuk pertama kalinya. Berdasarkan alasan inilah, China menyatakan bahwa LCS secara keseluruhan berada di bawah kedaulatannya. Akan tetapi, China belum menyampaikan klaim tersebut dalam undang-undang internasional apapun sehingga ketika UNCLOS ditetapkan, sengketa wilayah di LCS meningkat akibat bertambahnya aktor yang dapat mengajukan klaim

berdasarkan pasal dalam konvensi tersebut. UNCLOS yang diadopsi pada 1982 menetapkan setiap negara berhak untuk memasukkan wilayah hingga 12 mil laut sebagai bagian dari kedaulatannya dan 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (Furtado, 1999: 386-401).

Klaim awal China untuk pertama kalinya juga berkaitan dengan penandatanganan *The Convention Respecting the Delimitation of the Frontier* antara China dan Tonkin pada 26 Juni 1887. Konvensi ini juga menyertakan Perang China-Perancis tahun 1884-1885. Dalam Pasal 3 konvensi tersebut disertakan penghilangan batas batas teritorial antara Perancis dan China di LCS. Ambiguitas ini diterjemahkan oleh China sebagai penyerahan kedaulatan atas wilayah Paracel dan Spratly kepada China.

Selama abad ke-19 hingga awal 1990-an, China melakukan beberapa usaha agar kontrol terhadap LCS berada di bawah konvensi tersebut. Saat berakhirnya Perang Dunia II, Taiwan menduduki dan melakukan operasi di Pulau Itu Aba. Pada waktu yang sama, Perancis menunjukkan eksistensi yang tetap dalam sengketa di kawasan tersebut dengan memberi dukungan kepada Vietnam atas klaimnya di kawasan itu. Kedaulatan atas LCS kemudian menjadi

hal yang semakin membingungkan. Setelah Perancis meninggalkan Indochina, status Spratly menjadi tidak jelas sehingga memungkinkan Taiwan mengambil alih wilayah tersebut yang tentunya tidak dapat diterima oleh negara-negara di sekitarnya sehingga memicu pengajuan klaim yang sama.

Tiga dekade setelahnya, sengketa teritorial tersebut menjadi isu yang semakin penting dengan pengajuan klaim oleh lima negara. Pada bulan Agustus 1951, Menteri Luar Negeri China Zhou Enlai merespon *draft* Perjanjian San Francisco dengan menggarisbawahi posisi Beijing di LCS bahwa “Kepulauan Paracel dan Spratly adalah wilayah kekuasaan China yang pada masa perang sempat diduduki oleh Jepang, kemudian diambil alih kembali oleh China setelah Jepang menyerah”. Dengan demikian, Pemerintah China mendeklarasikan bahwa LCS diambil alih oleh pemerintah China saat Jepang menyerah.

### **Keterlibatan Pihak di Luar Kawasan LCS**

China melakukan upaya membangun kemitraan strategis dengan Rusia dalam menghadapi kebijakan strategis AS seperti perluasan NATO, *National Missile Defence*, dan isu Taiwan. Terlebih, China juga telah

memperluas pengaruh strategisnya di kawasan Asia Tengah dengan membentuk *Shanghai Cooperation Organization*. China membuka diri untuk hubungan yang lebih luas dengan negara-negara lain terutama melalui pembangunan ekonomi dan hubungan dagang yang intensif.

Keberhasilan China dalam sektor ekonomi menjadikannya sebagai negara eksportir terbesar di dunia. Karena itu, menemukan produk China adalah hal yang paling mudah dilakukan di hampir seluruh penjuru bumi. China ingin menjadi kekuatan ekonomi yang paling kuat. Keinginan tersebut telah dibuktikan. Kapabilitas ekonomi China memungkinkannya untuk melengkapi diri dengan sistem persenjataan yang mampu menyaingi negara-negara saingannya. Dengan kemampuan untuk melengkapi diri dengan persenjataan mutakhir dan konsentrasi untuk membangun kapabilitas militernya, China menjadi negara yang kuat.

Pengaruh AS di dunia, termasuk di Asia, juga mengalami perubahan. Diperlukan satu kekuatan dominan baru yang akan menjadi stabilisator kawasan. China dengan cepat melihat peluang kekosongan kekuasaan di kawasan Asia serta melakukan upaya-upaya untuk dapat menunjukkan *power* di kawasan Asia. Di tengah peningkatan kekuatan

China, terjadi penurunan kekuatan AS. Krisis ekonomi yang menghantam AS pada tahun 2007 lalu masih mempengaruhi semua sektor. Selain itu anggaran pertahanan AS pun banyak yang dialokasikan untuk perang di Timur Tengah. Serangan teroris 9/11 pada tahun 2001 telah mengubah hegemoni AS. Kemajuan China terbukti telah menjadi sumber kekhawatiran AS. Kekuatan yang dimiliki China saat ini menjadi proyeksi kekuatan di masa yang akan datang. AS terancam akan tergeser oleh China dengan kapasitas ekonomi, kapabilitas militer, dan ketertantungan dunia pada China.

Salah satu usaha AS dalam membatasi kekuatan adalah membangun hubungan yang lebih intensif dengan negara-negara yang potensial untuk membangun kerja sama dengan China. Konflik LCS membuka kesempatan bagi AS untuk membangun kedekatan dengan Filipina, demikian juga Vietnam dan Malaysia. AS juga dapat membangun *multilateral code of conduct* untuk LCS.

Dengan demikian, keberadaan AS di LCS akan menjadi pelindung bagi negara-negara yang lebih lemah. Selain meningkatkan peranan AS di Asia, *multilateral code of conduct* juga akan mendorong peningkatan kerja sama dan keterikatan antar negara-negara ASEAN dan juga dengan AS. Malaysia, Vietnam,

dan Filipina diperkirakan tidak akan menarik klaimnya, terlebih lagi China. Pemerintah China melihat LCS sebagai “*core interest*” yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan. Tindakan yang agresif terlihat ketika awal tahun 2012 kapal-kapal China memotong kabel-kabel kapal Vietnam yang sedang beroperasi di LCS. Dalam kurun waktu satu tahun telah terjadi sedikitnya sepuluh peristiwa konfrontasi antara China dan Filipina.

Tindakan China menjadi petunjuk bagi negara lain terutama Vietnam, Malaysia, dan Filipina bahwa konflik sengketa LCS akan sulit diakhiri dengan damai. Ketiganya juga kemudian memahami bahwa ASEAN, sebagai organisasi kawasan tempat ketiga negara tersebut bernaung, tidak dapat berbuat banyak, terlebih setelah kegagalan membuat kesepakatan yang dapat menyelesaikan klaim teritorial. Membangun aliansi dengan negara yang lebih besar dan kuat serta dianggap mampu menjadi penjamin keselamatan adalah langkah yang kemudian ditempuh oleh negara-negara tersebut. Filipina semakin dekat dengan AS. Ketika Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton berpidato di Hanoi, ia menyatakan bahwa AS akan beraliansi dengan Asia Tenggara dalam konflik LCS. Selain itu, Hillary juga menyatakan bahwa AS mendukung

kolaborasi diplomasi oleh setiap pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan tanpa penggunaan kekerasan (England, 2012).

AS secara tegas memberikan dukungan kepada Filipina sehingga negara tersebut dapat membeli persenjataan-persenjataan laut yang merupakan perlengkapan Filipina dalam menghadapi sikap reaktif China. Filipina yang atas bantuan AS memiliki persenjataan laut modern semakin memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi China di LCS. Tidak hanya bantuan perlengkapan senjata kelautan, AS dan Filipina juga telah menyepakati perjanjian pertahanan bersama yang akan mendatangkan pasukan AS untuk membantu Filipina untuk membantu konflik di LCS. Sejalan dengan itu, *Stockholm International Peace Research Institute* mencatat peningkatan perlombaan senjata di Asia Tenggara dengan peningkatan pembelian persenjataan negara-negara di kawasan itu mencapai 50% dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (England, 2012).

Kepentingan AS di LCS tidak hanya sebatas pada kepentingan jalur perdagangan dengan Jepang dan Korea. AS juga menangkap sinyal yang ditunjukkan untuk menjadi kekuatan yang dominan. Untuk itu, AS membangun hubungan yang lebih intensif dengan

negara-negara di Asia. AS membangun hubungan kembali dengan Filipina dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan Vietnam, membentuk aliansi *de facto* dengan Singapura dan mencoba mendekati Kamboja dan Myanmar, dua negara yang sebelumnya diasingkan AS. Jelas terlihat bahwa Amerika mengubah konsentrasinya dari Timur Tengah ke Asia melalui pembentukan kemitraan dan kerja sama dengan negara-negara di Asia. AS secara terbuka memberi peringatan kepada China atas klaimnya terhadap lintasan. Padahal AS berkepentingan dalam memberikan resolusi yang diterima semua pihak. AS memberi perhatian yang sangat serius kepada LCS dan secara berkala mengirim kapalnya melintasi wilayah tersebut dan menganggap sengketa perairan sebagai hal yang sangat penting. Sikap AS tersebut menimbulkan kemarahan China (Kurlantzick, 2011).

Tidak hanya AS, India juga ikut terlibat dalam sengketa tersebut. Di tengah kuatnya klaim yang diajukan oleh China di LCS, keterlibatan India sebagai rekan AS juga semakin kuat. Meski campur tangan AS di LCS pada tahun 2012 tidak seintensif tahun-tahun sebelumnya, tetapi AS dipastikan akan tetap mengambil peranan sebagai pendukung negara-negara anggota ASEAN yang membutuhkan bantuan

dari luar kawasannya. Konflik LCS menjadi salah satu faktor penentu hubungan AS dengan negara-negara aliansinya di Asia. Menurut laporan dalam *Asian Alliances in Twenty-First Century*, para ahli keamanan AS berpendapat bahwa untuk menghadapi konflik, AS perlu meningkatkan aliansi militer yang lebih luas, lebih kuat, dan lebih koheren di Asia.

Sebagai organisasi kawasan, ASEAN terbukti tidak memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik yang melibatkan negara-negara anggotanya sejak bertahun-tahun. Sebaliknya, dengan adanya sengketa LCS, peran China di ASEAN semakin meningkat. Negara anggota lain yang tidak terlibat konflik juga membangun kedekatan yang semakin baik dengan China. Bahkan, Thailand, yang sangat dekat dengan China, ditakutkan Malaysia dan Vietnam akan mendukung China bila terjadi konflik yang lebih serius di LCS. Dengan demikian, ASEAN tidak lagi dapat dilihat sebagai organisasi yang dapat mempersatukan dan melindungi sesama anggotanya.

Vietnam dan Filipina tidak hanya beraliansi dengan AS, tetapi juga dengan India. Vietnam membangun kerja sama dengan India yang memicu kemarahan China. India dan Vietnam telah menyepakati eksplorasi energi bersama

di LCS yang oleh media China ditanggapi dengan sangat buruk. Menurut *Financial Times*, kapal perang China menghadang kapal India yang akan keluar dari pelabuhan Vietnam pada Juli 2012. Kejadian tersebut merupakan pertentangan pertama antara China dan India di LCS. Akan tetapi, hal tersebut mengisyaratkan konflik di kawasan tersebut akan cenderung memanas.

Keberadaan AS di LCS membangun peta politik baru. Adalah pilihan yang cukup sulit bagi negara-negara di Asia untuk menentukan pilihan antara AS sebagai negara yang memiliki kekuatan dominan dan China yang akan menjadi pusat integrasi ekonomi Asia. Vietnam, Singapura, dan negara-negara lain masih menunjukkan ketidaksiapan dalam memilih di antara keduanya. Jika tidak menginginkan pola aliansi dan kekuasaan pada saat Perang Dingin, AS perlu melakukan tindakan yang tegas untuk dapat mendorong negara-negara di Asia menentukan posisinya.

Dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang diselenggarakan musim panas di Bali pada tahun 2011, China dan ASEAN membuat *draft* kesepakatan sebagai jalan penyelesaian damai atas sengketa LCS yang didasarkan pada kesepakatan sebelumnya. Namun, kesepakatan tersebut hampir menyelesaikan

kan isu utama dan keterlibatan AS sebagai penjamin hak-hak negara-negara Asia Tenggara cenderung semakin meningkat.

Kesepakatan antara ASEAN dan China tidak berhasil menyelesaikan konflik di LCS. Kesepakatan tersebut hanya berfungsi lebih pada komitmen untuk menjalankan petunjuk bagi negara-negara yang mengajukan klaim karena sudah pasti negara-negara yang mengajukan klaim akan sulit sekali untuk menarik klaimnya. Kesepakatan tersebut tidak dapat diharapkan sebagai solusi perdamaian yang menyelesaikan masalah sebab terdapat ketidakpastian pada kalimat-kalimat dalam kesepakatan tersebut dan lebih banyak berfokus pada isu pemeliharaan lingkungan daripada klaim teritorial yang *overlapping*.

### **Dualisme China terhadap ASEAN**

Pada dasarnya, China menerapkan diplomasi, kerja sama, dan menjalin hubungan yang luas dengan negara-negara lain, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam sengketa teritori, China juga memiliki sejarah penyelesaian konflik teritori dengan diplomasi. Para pemimpin China cenderung membuka diri untuk kerja sama daripada menggunakan kekuatan militer terutama sejak berakhirnya Perang Dingin. China membuka diri

lebih luas dengan menjadi bagian dari organisasi-organisasi internasional dan secara intensif juga membangun kerja sama bilateral, baik dengan negara yang sebelumnya tidak memiliki hubungan diplomatik maupun peningkatan hubungan diplomatik yang telah ada.

China menjadi anggota forum *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) di tahun 1991. China juga menjadi mitra dialog dan mendirikan *Asia-Europe Member Southeast Asian Nations* (ASEAN) di tahun 1994 dan mendirikan *Asia-Europe Meeting* pada tahun 1996 serta mendirikan *Shanghai Five* yang menjadi perintis berdirinya *Shanghai Cooperation Organization* (Shie, 2007: 307-326). Meski China pada masa-masa ini cenderung sangat multilateralis, terutama dengan negara-negara di Asia, China tetap menunjukkan kesiapannya untuk menggunakan kekuatan militer seiring dengan meningkatnya ancaman yang dihadapinya. Kesiediaan China dalam menggunakan kekuatan militer terbukti dalam kasus Spratly pada 1995 dan juga dalam sengketa Selat Taiwan pada 1995-1996 (Shie, 2007: 149).

China adalah negara yang sangat terbuka untuk kerja sama, terutama dalam bidang ekonomi. Namun dalam sengketa wilayah, China masih sangat mengandalkan kekuatan militer terutama

di LCS. China menjalin kerja sama dengan negara-negara penghasil energi di Afrika, AS dan Asia (Buszynski dan Sazlan, 2007: 144-171). Pada awal 1990-an, China meningkatkan strategi diplomasi dengan negara-negara tetangganya. China juga membuka negosiasi China-Rusia pada tahun 1991 terkait sengketa wilayah dan menandatangani perjanjian persahabatan kerja sama dengan Mongolia pada tahun 1994. China, yang sejak 1993 menjadi negara importir minyak terbesar kedua dan bahkan menurut Zhu Jianjun dari *National Petroleum* akan mencapai 60% pada 2020, memerlukan akses energi di LCS yang di dalamnya terdapat kerja sama dengan ASEAN (Buszynski dan Sazlan, 2007: 155). Kerja sama dengan ASEAN menjadi penting, tetapi persaingan dengan ASEAN adalah juga hal yang sangat berpengaruh sebab tiga negara yang juga mengajukan klaim atas LCS adalah Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Pada tahun 1997, China meluncurkan *charm offensive* ke Asia Tenggara yang merupakan gabungan antara diplomasi, ekonomi, dan budaya baik dalam tingkat bilateral maupun multilateral. China juga bergabung dengan Jepang dan Korea Selatan dalam forum ASEAN+3 yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama multilateral

antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Selain itu, China juga tergabung dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dan menandatangani *Code of Conduct* wilayah LCS pada 2020. China meningkatkan jumlah pertukaran pelajar serta kunjungan wisata dan pembangunan-pembangunan infrastruktur, seperti jembatan di Surabaya dan rel kereta api jalur utara di Filipina. Dengan demikian, dalam waktu yang cukup singkat, hubungan China dengan Asia Tenggara meningkat drastis (Buszynski dan Sazlan, 2007: 155). Di sisi lain, beberapa negara ASEAN melibatkan perusahaan-perusahaan internasional dalam kerangka kerja sama eksplorasi cadangan minyak di kawasan LCS yang diklaim China. Padahal, eksplorasi tersebut dilakukan dalam batas ZEE eksklusif negara lain.

Kondisi demikian mempertajam konflik di LCS. Akibatnya, sumber daya energi di kawasan tersebut tidak dapat dieksplorasi secara maksimal. Perusahaan-perusahaan multinasional menjadi takut untuk melakukan kerja sama eksplorasi di kawasan tersebut (Shie, 2007: 140). *Energy cooperation* tidak dapat dilaksanakan sebagai penyelesaian atas konflik. Padahal, jika energi menjadi motivasi utama dalam klaim-klaim di LCS, *energy cooperation* adalah

cara yang tepat untuk memperoleh energi. *Energy cooperation* antara perusahaan-perusahaan minyak nasional dapat membangun rasa percaya diri dan menjadi ukuran stabilitas suatu kawasan yang kemudian dapat membuka jalan kerja sama lebih jauh bahkan menjadi langkah untuk membangun rezim maritim (*maritime regime building*) yang pada akhirnya dapat memaksimalkan eksplorasi sumber daya alam. Melalui *energy cooperation*, masalah yang ditimbulkan oleh perebutan kedaulatan dapat dihindarkan, demikian juga segala ketidakpastian di kawasan tersebut.

Sikap China membawa negara-negara ASEAN berpendapat bahwa hubungan diplomatik yang dibangun China dengan ASEAN adalah hubungan diplomatik semu yang bertujuan untuk mencegah bersatunya negara-negara anggota ASEAN dan membangun oposisi dengan China. Sejalan dengan itu, motivasi utama China bereaksi agresif di LCS bukanlah cadangan energi. Sikap unilateralis China tidak sejalan dengan kebijakan pertahanannya yang menyatakan bahwa aksi militer hanya dilakukan untuk menghadapi serangan. Salah satu poin dalam diplomasi pertahanan China yang diambil website resmi Kementerian Pertahanan Nasional China

(<http://eng.mod.gov.cn/>) adalah sebagai berikut:

*“... implements a military strategy of active defense. Strategically, it adheres to the principle of featuring defensive operations, self-defense and striking and getting the better of the enemy only after the enemy has started an attack. In response to the new trends in world military developments and the requirements of the national security and development strategy, has formulated a military strategic guideline of active defense for the new period.”*

Dari poin itu, terminologi *active defense* dalam kalimat tersebut menimbulkan kerancuan apakah China menerapkan strategi ofensif atau defensif. Pada kenyataannya, China adalah pihak yang lebih aktif melibatkan kekuatan militer di LCS.

### **Mekanisme Penyelesaian di Tingkat ASEAN**

Dari lima negara yang mengajukan klaim kedaulatan di LCS, empat negara di antaranya adalah anggota ASEAN, yakni Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Secara politis, hal ini menempatkan China menjadi pihak oposisi ASEAN yang dipersatukan oleh kepentingan tiga anggotanya. Hal tersebut mendorong ASEAN untuk mendesak China

menerima deklarasi ASEAN 2002 tentang *Conduct of Parties* di LCS. Hal ini berguna mengurangi ketegangan antara China dan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara (Dutton, 2011: 4-26). Deklarasi 2002 tersebut mencakup kesepakatan setiap pihak untuk menetapkan wilayah teritorial masing-masing dan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum damai, tanpa penggunaan kekerasan. Deklarasi itu kemudian dijadikan acuan bagi setiap negara yang bersengketa dalam bertindak. Hingga satu dekade sejak deklarasi tersebut disepakati, kondisi LCS setelah 1995 relatif aman. China melakukan perubahan pada kebijakannya untuk meningkatkan integrasi regional dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara dengan tujuan peningkatan ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan program-program kebudayaan.

Norma dan kesepakatan menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam penyelesaian konflik LCS. Hal ini juga penting untuk mencegah konflik yang lebih dalam. ASEAN dan China menandatangani deklarasi kesepakatan yang mengatur sikap setiap pihak di LCS pada November 2002. Ini merupakan momen pertama kali China menerima kesepakatan multilateral tentang isu LCS. ASEAN berusaha mendapatkan

pengakuan China atas norma-norma internasional yang diberlakukan terhadap LCS sejak tahun 1992. Sedangkan China memperlakukan LCS sebagai *lost territories* yang harus dipersatukan kembali dengan daratan sehingga tidak merespon permintaan ASEAN (Buszynski, 2003: 143-150).

Sikap China terhadap LCS berbeda setelah Taiwan lepas dari China pada tahun 1995-1996, terlebih setelah terlibat dengan AS melalui *Visiting Forces Agreement of 1998*, China menyadari nilai dari norma dan perilaku (*value of norms of behavior*) dalam mendesak kekuatan eksternal (*external powers*). Dalam situasi *power* yang dominan terlihat jelas dapat mengambil keuntungan dari pihak yang lemah, diperlukan sebuah kekuatan penyeimbang untuk melakukan negosiasi penetapan norma dan peraturan. Tanpa kekuatan penyeimbang, tidak akan ada insentif yang dapat diambil oleh pihak yang *power*-nya dominan untuk menerima desakan atas norma dan peraturan.

Dalam hal norma dan kesepakatan, ASEAN dan China pernah menandatangani *code of conduct* yang merupakan landasan bagi kedua belah pihak dalam bertindak. Namun hingga kini, landasan tersebut belum ditransfer dalam bentuk sikap yang menjaga

hubungan baik antarpihak yang berkonflik. Meski belum dilaksanakan, kesediaan China dalam menandatangani deklarasi tersebut merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga nama baiknya di ASEAN sehingga terbuka bentuk kerja sama lainnya seperti perdagangan bebas *China-ASEAN Free Trade Area* (CAFTA). China sebelumnya bersikeras dengan kesepakatan bilateral dengan sesama negara yang juga mengajukan klaim terhadap LCS dan menghindari kesepakatan multilateral. Deklarasi tersebut mengindikasikan perubahan dalam pola pendekatan terhadap konflik.

Pada tanggal 4 November 2002, ASEAN menandatangani deklarasi kesepakatan sebagai acuan untuk LCS dengan China. Bagi ASEAN, hal ini dianggap sebagai satu batu loncatan, titik awal kesepakatan. Sebelumnya, China bersikeras untuk berfokus pada kesepakatan bilateral dan menghindari kesepakatan multilateral. China lebih memilih kesepakatan bilateral dengan negara-negara yang juga mengajukan klaim atas wilayah LCS ketika China dinilai berupaya untuk melakukan pemulihan atas kehilangan wilayah teritorial dan kedaulatan atas wilayah tersebut. Fase kedua adalah tahun 1999 hingga saat ini di mana China dinilai terang-terangan menunjukkan kepeningangan yang lebih besar dalam konflik

LCS dan bersikap lebih menerima negosiasi terhadap norma-norma ketentuan dengan ASEAN.

Deklarasi panduan yang mengatur sikap setiap pihak yang ditandatangani oleh ASEAN dan China sempat membekukan sengketa teritorial di wilayah tersebut. Akan tetapi, klaim kedaulatan kembali muncul terutama oleh China. Untuk menghindari perpecahan pihak-pihak bersengketa, China mulai mengadakan negosiasi untuk membuat *code of conduct* yang baru pada 2010. Partisipasi China dalam penandatanganan *code of conduct* tersebut merupakan perubahan besar pada China yang sebelumnya menolak negosiasi multilateral (Nehru, 2012). Meski negosiasi tersebut sudah disepakati, ketegangan di LCS diprediksi akan terus meningkat karena tiga hal. *Pertama*, peningkatan kapabilitas persenjataan dan kecenderungan yang tinggi untuk mempertahankan klaim negara. *Kedua*, peningkatan nasionalisme dan rasa percaya diri China. *Ketiga*, proses penyeimbangan kebijakan AS di Asia.

Sejak 1992, potensi terjadinya ketegangan sudah terlihat di LCS. Akan tetapi, negosiasi multilateral masih tidak memberi hasil yang efektif hingga saat ini (Rousseau, 2011). Belum ada mekanisme multilateral yang benar-

benar dijalankan oleh setiap pihak yang bersengketa. Secara jelas, China menghindari negosiasi multilateral dan lebih menyukai jika isu LCS dipisahkan dari ASEAN. China berusaha untuk mengeluarkan isu LCS dari agenda *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan militerisasi di Kepulauan Spratly. Dari sisi China, kedaulatan di kepulauan tersebut dapat dinegosiasikan bila dilakukan dengan negosiasi bilateral, bukan multilateral.

### **Kesimpulan**

*Power* dapat meningkatkan kemakmuran, sebaliknya kemakmuran akan meningkatkan *power* suatu negara. Pentingnya penguasaan wilayah teritorial menjadi salah satu alasan China bertahan di LCS. Jika China mampu mempertahankan wilayah LCS, hal tersebut akan menjadi kebanggaan bagi China serta menjadi salah satu faktor yang memperkuat negara tersebut. Dengan menjadi pemilik kedaulatan di LCS, China menjadi pemilik hak atas segala sumber daya yang ada di wilayah tersebut. China juga akan menjadi negara yang lebih disegani di dunia internasional karena berhasil mengalahkan negara-negara pengklaim lainnya sehingga hal tersebut membentuk citra China sebagai negara yang lebih kuat. Kemenangan China tersebut akan

digunakan negara-negara lain yang juga terlibat sengketa wilayah dengan China sebagai preseden atas suatu sengketa di wilayah LCS yang merupakan salah satu jalur perdagangan dunia terpenting. Hal ini menjadi salah satu alasan negara-negara di sekitarnya memperjuangkan kedaulatan di samping alasan keamanan negara di daerah perbatasan. Jika berhasil menjadikan dirinya sebagai satu-satunya pihak yang berdaulat di LCS, China berhasil mengalahkan UNCLOS yang merupakan konvensi internasional. Kekuatan akan semakin terbukti. China akan mendapat pengakuan atas kekuatannya, terlebih akan menahan negara-negara lain dalam berhubungan dengan China. Dengan kata lain, kemenangan China di LCS akan menjadi dasar kemenangan lain di masa yang akan datang.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Gilpin, Robert. *War and Change in World Politics*. Cambridge: Princeton University, 2009.
- Till, Geoffrey. *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. New York: Routledge, 2009.

#### Jurnal

- Buszynski, Leszek dan Iskandar Sazlan. "Maritime Claims and Energy

Cooperation in the South China Sea". *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 29, No. 1 (April 2007), hal. 144-171.

- Buszynski, Leszek. "ASEAN, the Declaration and Conduct, and the South China Sea". *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25, No. 3 (Desember 2003), hal. 343-362.
- Dutton, Peter. "Three Disputes and Three Objectives: China and the South China Sea". *Naval War College Review*, Vol. 64, No. 4 (Autumn 2011), hal. 42-67.
- Furtado, Xavier. 1999. "International Law and the Dispute over the Spratly Islands: Whiter UNCLOS?". *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 21, No. 3 (Desember 1999), hal. 386-404.
- Hyer, Eric. "The South China Sea Disputes: Implications of China's Earlier Territorial Settlements". *Pacific Affairs*, Vol. 68, No. 1 (Spring 1995), hal. 34-54.
- Lai, Hongyi Harry. "China's Oil Diplomacy: Is It a Global Security Threat?". *Third World Quarterly*, Vol. 28, No. 3 (2007), hal. 519-537.
- Shie, Tamara Renee. "Rising Chinese Influence in The South Pacific: Beijing's Island Fever". *Asian*

*Survey*, Vol. 47, No. 2 (Maret-April 2007), hal. 307-326.

Smith, Esmond D., Jr. "China's Aspirations in the Spratly Islands". *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 16, No. 3 (Desember 1994), hal. 274-294.

Zha, Daojiong. "Localizing the South China Sea Problem: The Case of China's Hainan". *Pacific Review*, Vol. 14, No. 4 (2001), hal. 575-598.

Zweig, David dan Bi Jianhai. "China's Global Hunt for Energy". *Foreign Affairs*, Vol. 84, No. 5 (September-Oktober 2005), hal. 25-38.

### Dokumen Lain

Dobson, William J. dan M. Taylor Fravel. "Red Herring Hegemon: China in the South China Sea". *Current History* (September 1997).

Lum, Thomas. "The Republic of Philipines and U.S. Interests". *CRS Report for Congress*. Washington: Congressional Research Service, 2012.

### Internet

Alexander, David dan Manuel Mogato. "U.S. and Philipines Eye Stronger Defense Ties". *Reuters*. <http://www.reuters.com/article/20>

[12/01/26/us-philippines-us-idUSTRE80P22320120126](http://www.reuters.com/article/2012/01/26/us-philippines-us-idUSTRE80P22320120126)

(diakses pada tanggal 1 Juni 2012 pukul 23.39 WIB).

England, Vaudine. "Why are South China Sea Tensions Rising?". *BBC News*. <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11152948> (diakses pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 23.20 WIB).

Kelly, Michael J. "The Bush Foreign Policy 2001-2003: Unilateralist Theory in A Multilateral World, and the Opportunity for Change Offered by Iraq". *Washington University Law*. [http://law.wustl.edu/wugslr/issues/Volume2\\_1/p221kelly.pdf](http://law.wustl.edu/wugslr/issues/Volume2_1/p221kelly.pdf) (diakses pada tanggal 25 Mei 2012 pukul 15.40 WIB).

Kurlantzick, Joshua. "Growing US Role in South China Sea". *Council on Foreign Relations*. <http://www.cfr.org/china/growing-us-role-south-china-sea/p26145> (diakses pada tanggal 25 Mei 2012 pukul 20.33 WIB).

Nehru, Vikram. "Rising Tensions in the South China Sea". *East Asia Forum*. <http://www.eastasiaforum.org/2012/03/03/rising-tensions-in-the-south-china-sea/> (diakses pada

tanggal 22 April 2010 pukul 14.33 WIB).

Rousseau, Richard. "South China Sea: Rising Tensions but No Permanent Solutions on the Horizon". *Foreign Policy Journal*.

<http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/09/16/south-china-sea-rising-tensions-but-no-permanent-solutions-on-the-horizon/> (diakses pada tanggal 2 Juni 2012 pukul 22.15 WIB).

Wines, Michael. "Dispute Between Vietnam and China Escalates Over Competing Claims in South China Sea". *New York Times*.  
[http://www.nytimes.com/2011/06/11/world/asia/11vietnam.html?\\_r=1](http://www.nytimes.com/2011/06/11/world/asia/11vietnam.html?_r=1)

"Paracel (Xisha) Islands – 1974". *GlobalSecurity.org*.

<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/paracel.htm>

(diakses pada tanggal 24 April 2012 pukul 19:36 WIB).

[http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a\\_cn4\\_500.pdf](http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_500.pdf) (diakses pada tanggal 13 April 2012 pukul 16.43 WIB).

<http://www.china-briefing.com/news/2011/05/31/chinas-territorial-disputes-in-the-south-china-sea-and-east-china-sea.html>

(diakses pada tanggal 5 Juni 2012 pukul 21.24 WIB).

<http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2004/art6-w04.htm> (diakses pada tanggal 20 April 2012 pukul 23.22 WIB).

<http://www.southchinasea.org/> (diakses pada tanggal 24 April 2012 pukul 22.34 WIB).

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2174rank.html> (diakses pada tanggal 10 Januari 2012 pukul 22.42 WIB).

